

# DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PEMBERITAAN KONFLIK ANTARA AHOK DENGAN DPRD DKI DI KOMPAS.COM

(Analisis Isi Kuantitatif Komentar Pembaca Kompas.com dalam Pemberitaan Konflik antara Ahok dengan DPRD DKI periode 27 Januari-13 April 2015)

Deanisa Putri Ayuninda  
Lukas Suryanto Ispandriarno  
Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Babarsari No. 6, Yogyakarta 55281

## Abstrak

Di era demokrasi dan digital media yang berkembang sangat pesat seperti sekarang, masyarakat dapat dengan mudah menyuarakan pendapat. Salah satunya melalui kolom komentar yang telah disediakan oleh situs berita online. Melalui kolom komentar tersebut masyarakat dapat berkomentar, bahkan berinteraksi dan berdiskusi dengan masyarakat lainnya. Diskusi tersebut menciptakan sebuah proses demokrasi baru, salah satunya proses demokrasi deliberatif. Oleh karena itu, penelitian ini melihat proses interaksi demokrasi deliberatif dalam kolom komentar Kompas.com terkait konflik antara Ahok dengan DPRD DKI periode 27 Januari-13 April 2015.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan pendekatan kuantitatif. Melalui simple random sampling diperoleh sampel sebanyak 100 komentar dari populasi sebanyak 36.957 komentar dan teknik analisis penelitian ini dibantu dengan adanya coder. Penelitian ini dianalisis berdasarkan lima syarat kondisi demokrasi deliberatif menurut James S. Fishkin. Kelima syarat kondisi demokrasi deliberatif tersebut antara lain: Information, Substantive Balance, Diversity, Conscientiousness dan Equal Consideration. Kelima syarat tersebut menentukan proses interaksi dalam demokrasi deliberatif. Tetapi, dalam proses interaksi seseorang harus membuka identitas dirinya, oleh karena itu peneliti menambahkan satu unsur analisis yaitu nama pembaca.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa kondisi demokrasi deliberatif dalam konflik antara Ahok dengan DPRD DKI di Kompas.com belum berjalan sesuai dengan syarat kondisi demokrasi deliberatif Fishkin. Terbukti dari syarat kondisi demokrasi deliberatif interaksi mendapatkan nilai 27, mengingat syarat utama dari proses demokrasi deliberatif yaitu adanya interaksi atau diskusi. Proses demokrasi atau interaksi di media online tidak lantas membuat masyarakat menggunakan nama anonim saat menyampaikan pendapat. Adanya anonimitas tidak selaras dengan proses demokrasi deliberatif, karena salah satu prinsip diskusi dalam demokrasi deliberatif adalah keterbukaan identitas.

**Kata kunci:** Demokrasi deliberatif, James S. Fishkin, kondisi demokrasi deliberatif, Ahok, DPRD DKI, APBD DKI 2015

## A. PENDAHULUAN

Sistem demokrasi Pancasila tidak lantas memberikan kebebasan seutuhnya kepada masyarakat untuk berpendapat. Masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tetapi, saat ini anggota

DPRD lebih mementingkan kepentingan partai dari pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat memanfaatkan ruang untuk menyampaikan pendapat, salah satunya dengan memanfaatkan ruang kolom komentar yang telah disediakan media. Melalui kolom komentar masyarakat dapat melakukan interaksi atau diskusi dengan masyarakat lain. Diskusi tersebut menciptakan sebuah proses demokrasi baru, salah satunya proses demokrasi deliberatif.

Berdasarkan tulisan Hardiman (2009:128) istilah deliberatif dari asal katanya “deliberasi” berasal dari bahasa latin *deliberatio* yang berarti konsultasi, menimbang-nimbang atau dalam kosa kata politik yakni musyawarah. Beberapa teoretikus yang telah mengembangkan teori demokrasi deliberatif seperti Habermas, Gutmann dan Thompson, kemudian James S. Fishkin. Menurut Fishkin dalam buku *When the People Speak : Deliberative Democracy and Public Consultation* (2009:33) untuk melihat demokrasi deliberatif dibutuhkan tiga hal yaitu kondisi deliberatif, kesetaraan publik, dan partisipasi.

Proses demokrasi deliberatif menjadi tempat yang cocok untuk menyampaikan pendapat melalui *new media*. Penelitian ini hendak melihat proses interaksi demokrasi deliberatif melalui kolom komentar di media *online* Kompas.com pada konflik antara Ahok dengan DPRD DKI mengenai APBD DKI periode 27 Januari-13 April 2015. Peneliti memilih komentar di Kompas.com terkait konflik antara Ahok dengan DPRD DKI karena menurut data Alexa.com (Alexa.Juni 2015. Alexa.com) Kompas.com memiliki persentase pengakses dari Indonesia lebih besar dari pada Detik.com, dengan persentase 92.6% sedangkan Detik.com 75,0%. Pemilihan konflik antara Ahok dengan DPRD DKI karena latar belakang Ahok dan gaya kepemimpinan Ahok yang menarik untuk diliput media.

Penelitian ini didasari dari keingintahuan peneliti untuk melihat bagaimana proses demokrasi deliberatif dalam kolom komentar pada media *online*. Sehingga penulis merumuskan masalah yaitu apakah komentar pembaca pada konflik antara Ahok dengan DPRD DKI di Kompas.com merupakan bentuk interaksi demokrasi deliberatif?

## B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa optimal proses demokrasi deliberatif yang digunakan masyarakat melalui kolom komentar Kompas.com terkait konflik Ahok dengan DPRD DKI periode komentar 27 Januari-13 April 2015.

## C. KERANGKA TEORI

Sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mengukur proses demokrasi deliberatif, peneliti merujuk pada pemikiran James S. Fishkin dalam buku *When the People Speak : Deliberative Democracy and Public Consultation* (2009:33) memaparkan: “*To explore the argument below we need working definitions of three democratic values: deliberation, political equality, and participation*”.

### a. *Deliberation*

Dari ketiga hal pokok di atas, Fishkin (2009:34) menjelaskan syarat-syarat terjadinya deliberatif yaitu, *information, substantive balance, diversity, conscientiousness, dan equal consideration* yang lengkapnya :

*a. Information: The extent to which participants are given access to reasonably accurate information that they believe to be relevant to the issue*

*b. Substantive balance: The extent to which arguments offered by one side or from one perspective are answered by considerations offered by those who hold other perspectives*

*c. Diversity : The extent to which the major positions in the public are represented by participants in the discussion*

*d. Conscientiousness: The extent to which participants sincerely weigh the merits of the arguments*

*e. Equal consideration: The extent to which arguments offered by all participants are considered on the merits regardless of which participants offer them.*

Agar terjadi kondisi demokrasi deliberatif, informasi yang didapatkan masyarakat haruslah jelas dan relevan dengan konteks. Informasi yang jelas dan relevan memicu kondisi *substantive balance* atau keseimbangan substantif. Kondisi di mana dari berbagai macam informasi yang diperoleh dijadikan dasar untuk berargumen. Berbagai macam argumen tersebut memicu kondisi *diversity* atau keragaman sudut pandang di masyarakat. Keragaman sudut pandang tersebut menunjukkan posisi masing-masing individu pada isu yang sedang bergulir.

Kondisi *conscientiousness* yaitu keterlibatan masyarakat untuk menciptakan peluang interaksi atau diskusi dengan masyarakat lain atau tidak. Untuk menciptakan kondisi diskusi yang kondusif, masyarakat harus menunjukkan kondisi *Equal consideration*. Kondisi dimana setiap argumen yang diberikan tidak menekan seluruh pihak. Untuk menciptakan seluruh kondisi tersebut, Fishkin menjelaskan saat hendak berdiskusi seseorang harus membuka identitas dirinya. Tetapi, keterbukaan identitas di media *online* memiliki kendala yaitu permasalahan anonimitas.

Wallace (2008:202) memaparkan: *Anonymity has sometimes been taken to mean "un-name-ability" or "namelessness."* Terkadang menjadi anonim memberikan kesempatan kepada seseorang untuk merasa lebih nyaman saat hendak berkomunikasi, yaitu dengan cara menyembunyikan identitas diri. Tetapi dengan menyembunyikan identitas, membuat informasi yang disampaikan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Wallace (2008:217), seseorang yang menyatakan diri sebagai anonimitas memiliki berbagai tujuan, antara lain:

1. *Anonymity for the sake of furthering action by the anonymous person, or agent anonymity;*
2. *Anonymity for the sake of preventing or protecting the anonymous person from actions by others or recipient anonymity;*
3. *Anonymity for the sake of a process, of process anonymity.*

Tujuan pertama anonimitas yaitu untuk melanjutkan dan memperlancarkan pesan seseorang anonim. Tujuan kedua dari untuk melindungi diri dari tindakan orang. Tujuan terakhir dari anonimitas digunakan untuk menjaga netralitas atau menjaga validitas dalam suatu proses yang akan dijalani.

b. *Political equality* atau Kesetaraan Politik

Kesetaraan politik dalam proses demokrasi deliberatif juga menjadi pertimbangan penting. Kesetaraan politik yang dimaksudkan oleh Fishkin (2009: 43) yakni masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi berimbang dari pemerintah.

### c. *Participation*

Partisipasi selalu melibatkan sebagian besar populasi dalam sebuah partisipasi politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan Fishkin (2009: 45) yaitu tingkah laku dari setiap anggota massa yang mengarahkan pada proses mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, pembentukan, pengangkatan atau pelaksanaan dari kebijakan.

### D. METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis isi kuantitatif. Objek penelitian adalah komentar pembaca Kompas.com periode 27 Januari-13 April 2015 terkait konflik antara Ahok dengan DPRD DKI mengenai APBD DKI 2015. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh komentar dengan total 36.957 komentar dan setelah dilakukan perhitungan dengan rumus Slovin, diperoleh 100 sampel komentar. Sebelum masuk ke dalam analisis objek penelitian, peneliti terlebih dulu melakukan uji reliabilitas. Langkah-langkah melakukan uji reliabilitas yaitu, peneliti ikut serta sebagai pengkoding utama dan memilih dua pengkoding yang memiliki kemampuan dalam menganalisis. Kemudian masing-masing pengkoding akan menerima lembar *coding sheet*. Sebelum, dua pengkoding akan diberi penjelasan mengenai batasan dan definisi unit analisis beserta kategori yang telah ditetapkan. Hasil dari masing-masing pengkoding akan dibandingkan dengan hasil yang didapat peneliti dengan menggunakan rumus *Coefficient Reliability* (CR), minimal 0,7 (70%). Di bawah ini adalah formula Holsti yang digunakan peneliti :

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

CR	: Coeficient Reliability
M	: Jumlah pernyataan yang disetujui masing-masing pengkoding
N1+N2	: Jumlah Pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding (N1=Coder 1, N2=Coder 2)

### E. HASIL TEMUAN

Berikut hasil temuan yang diperoleh setelah melakukan perhitungan dari tujuh unit pada 100 komentar konflik antara Ahok dan DPRD DKI di Kompas.com. Berikut hasil

untuk unit analisis paham, terkait, argumen, keragaman, interaksi, kesetaraan dan nama pembaca:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Analisis Paham**

Paham	Frekuensi	Persentase (dalam%)	Skor
Ya	95	95%	95
Tidak	5	5%	0
Total	100	100%	95

Sumber: *coding sheet*

**Tabel 1.2**  
**Hasil Analisis Terkait**

Tekait	Frekuensi	Persentase (dalam%)	Skor
Ya	82	82%	82
Tidak	18	18%	0
Total	100	100%	82

Sumber: *coding sheet*

**Tabel 1.3**  
**Hasil Analisis Argumen**

Argumen	Frekuensi	Persentase (dalam%)	Skor
Ya	61	61%	61
Tidak	39	39%	0
Total	100	100%	61

Sumber: *coding sheet*

**Tabel 1.4**  
**Hasil Analisis Keragaman**

Keragaman	Frekuensi	Persentase (dalam%)	Skor
Ya	76	76%	76
Tidak	24	24%	0
Total	100	100%	76

Sumber: *coding sheet*

**Tabel 1.5**  
**Hasil Analisis Interaksi**

Interaksi	Frekuensi	Persentase (dalam%)	Skor
Menanggapi	27	27%	27
Tidak menanggapi	73	73%	0
Total	100	100%	27

Sumber: *coding sheet*

**Tabel 1.6**  
**Hasil Analisis Kesetaraan**

Kesetaraan	Frekuensi	Persentase (dalam%)	Skor
Ya	11	11%	11
Tidak	89	89%	0
Total	100	100%	11

Sumber: *coding sheet*

**Tabel 1.7**  
**Hasil Analisis Nama Pembaca**

Nama pembaca	Frekuensi	Persentase (dalam%)	Skor
Nama lazim digunakan sebagai nama orang	80	80%	80
Nama tidak lazim digunakan sebagai nama orang	20	20%	0
Total	100	100%	80

Sumber: *coding sheet*


## F. PEMBAHASAN

### F.1 Temuan dan Analisis Demokrasi Deliberatif pada Komentar Pembaca konflik antara Ahok dengan DPRD DKI di Kompas.com berdasarkan Unit Analisis

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil dari masing-masing dimensi kondisi demokrasi deliberatif yang telah dijabarkan sebelumnya. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing dimensi kondisi demokrasi deliberatif:

#### 1. Analisis Isi untuk kategorisasi Paham

Berdasarkan penelitian, peneliti memperoleh hasil bahwa 95 komentar pembaca di dalam Kompas.com dapat dipahami dengan jelas. Berikut contoh komentar Rocky dari berita “Ini Usulan Anggaran Siluman DPRD DKI ke Dinas Pendidikan yang di ungkap Ahok” yang dapat dipahami meskipun menggunakan beberapa kalimat singkatan seperti bahasa yang digunakan saat SMS (Short Message Service):





**rocky**  
Rabu, 25 Februari 2015 | 22:05 WIB

salut deh!. Gw sebagai warga DKI baru tau nih. Berarti APBD pada masa Gub" terduhulu. udah PASTI UDAH DITILEP sama kecoa" dprd, terlepas Gub. ngak tau atau tau tapi pura" bego. Yang pasti apbd yg dulu" anggaran silumannya udah "dimakan" tuh ! Mana ngak mau rusak negara kalo begini, ck..ck..ck

Tanggapi Komentar

Laporkan Komentar

Skor: 0

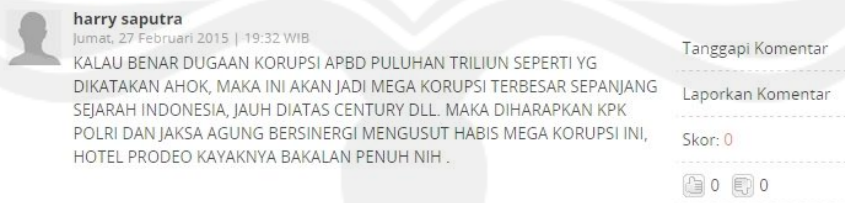
 0  0

Meskipun beberapa komentar ditulis dengan kata yang disingkat dan menggunakan bahasa tutur seperti yang dituliskan oleh Rocky “Gw”, “Gub”, “ngak” tetapi komentar tersebut tetap dapat dipahami dengan jelas. Penulisan Gw untuk menunjukkan “gue/aku” dalam bahasa asli Betawi, karena bahasa “Gw” sudah sering digunakan dan didengar melalui televisi maka komentar ini mudah untuk dipahami.

Komentar juga mudah untuk dipahami ketika penulis memberikan contoh dari apa yang dimaksudkan. Dengan memberikan contoh secara logis, pembaca lain memiliki kesempatan untuk memahami dan menanggapi komentar tersebut. Selain penggunaan contoh, penggunaan singkatan kata yang sudah umum di kalangan masyarakat, perlu juga menggunakan kalimat yang sederhana. Kalimat yang sederhana berarti memilih kata atau kalimat yang banyak diketahui maknanya, agar informasi dalam komentar mudah dipahami oleh pembaca lain. Dengan begitu mempermudah pembaca lain untuk memahami dan memberikan tanggapan atau terjadi peluang untuk berdiskusi.

## 2. Analisis Isi untuk kategori Terkait

Hasil yang ditemukan turunan dari dimensi *information* yaitu unit analisis terkait, bahwa komentar yang ada kaitannya dengan berita sebanyak 82 komentar. Sedangkan untuk komentar yang tidak terkait dengan isi berita sebanyak 18komentar. Berikut beberapa komentar yang mengaitkan dengan berita:



**harry saputra**  
 Jumat, 27 Februari 2015 | 19:32 WIB  
 KALAU BENAR DUGAAN KORUPSI APBD PULUHAN TRILIUN SEPERTI YG DIKATAKAN AHOK, MAKA INI AKAN JADI MEGA KORUPSI TERBESAR SEPANJANG SEJARAH INDONESIA, JAUH DIATAS CENTURY DLL. MAKA DIHARAPKAN KPK POLRI DAN JAKSA AGUNG BERSINERGI MENGUSUT HABIS MEGA KORUPSI INI, HOTEL PRODEO KAYAKNYA BAKALAN PENUH NIH .

Tanggapi Komentar  
 Laporkan Komentar  
 Skor: 0  
 0 0

Pembaca Kompas.com atas nama Harry Saputra memperlihatkan bahwa apa yang dituliskan masih terkait dengan isi berita melalui kalimat “...seperti yang dikatakan Ahok.” Harry membuat komentar berdasarkan isi berita yang berjudul “Ahok ke KPK Pimpinan DPRD Tidak Takut,” dari berita tersebut dipaparkan Ahok melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut



diduga menyangkut anggota DPRD yang berupaya memasukkan anggaran “siluman” ke dalam APBD. Belum diketahui pasti laporan Basuki, apakah terkait temuan penyalahgunaan APBD 2014 atau upaya penggelembungan anggaran di APBD 2015. Informasi dari berita tersebut yang menjadikan dasar komentar dari Harry.

Sedangkan komentar yang tidak memiliki keterkaitan dengan berita sebagai berikut:



**yongky wibowo**

Selasa, 10 Februari 2015 | 12:48 WIB

Jelas DPRD ini salah minum obat dan marah besar skrg ini. Karna terkena imbas semua anggota DPRD Jakarta tdk terima gaji + tunjangan selama 6 bulan karna Telat pengesahan APBD. Makanya begitu ditantang Ahok bahas APBD direkam dan disiarkan Youtube ndak berani. Skrg via E-Katalog jadi lbh bersih.

Tanggapi Komentar

Laporkan Komentar

Skor: 1


👍 1 🗨️ 0

Pembaca Yongky Wibowo membuat komentar dari berita “DPRD Sebut Pemprov DKI Coba Sogok Rp 12 Triliun.” Isi berita tersebut mengenai Fahmi anggota DPRD DKI yang menyatakan pihak eksekutif sengaja menawarkan Rp 12 triliun kepada legislatif dengan syarat tidak megubah kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sudah tercantum dalam APBD. Sedangkan isi komentar Yongky membahas mengenai gaji DPRD DKI, maka komentar Yongky tidak terkait dengan berita, tetapi terkait dengan isu konflik Ahok dengan DPRD DKI.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ketika masyarakat menggunakan haknya untuk berpendapat di setiap isi berita, sebenarnya banyak hal yang bisa disampaikan. Setidaknya dengan menuliskan komentar yang terkait dengan berita, maka memungkinkan peluang untuk adanya proses diskusi antara pembaca.

### 3. Analisis Isi untuk kategori Argumen

Hasil analisis diperoleh bahwa komentar yang memiliki argumen sebanyak 61 komentar. Sedangkan untuk komentar yang tidak memiliki argumen sebanyak 39 komentar. Contoh komentar yang memiliki argumen sebagai berikut:



**Arif J**  
Kamis, 2 April 2015 | 22:35 WIB

Ahok betul. Dirjen salah. Anggaran ini sangat berpihak pada rakyat. Dengan bayar pegawai profesional dengan TKD, rakyat akan terlayani dengan baik dan tdk ada pungli. Kalau infrastruktur, dgn waktu pendek, sangat tdk masuk akal untuk didanai besar, akan ada silpa yg siap jadi bancakan. Budaya korup

Tanggapi Komentar

Laporkan Komentar

Skor: 0


👍 0 🗨️ 0

Komentar dari judul berita “Kemendagri Soroti RAPBD DKI 2015 Tak Berpihak kepada Rakyat”. Arif menyatakan bahwa “Ahok betul, Dirjen salah” pernyataan tersebut didukung dengan argumen mengapa Arif menyatakan Ahok betul dan Dirjen salah. Menurut argumen Arif mengapa Ahok benar karena anggaran sangat berpihak pada rakyat. Selain memberi argumen, Arif menyatakan harapannya agar rakyat mendapatkan pelayanan publik yang baik dan tidak ada pungutan liar (pungli).

Masyarakat tidak hanya menggunakan haknya untuk menyatakan suka atau tidak suka dengan isu yang bergulir, tetapi juga memiliki argumen. Dari syarat ketiga kondisi demokrasi deliberatif setidaknya saat orang berpendapat dan mengungkapkan alasannya maka ada peluang untuk berdiskusi, bukan hanya sekedar komentar yang berisi emosi sesaat saja.

#### 4. Analisis Isi untuk kategori Keragaman

Hasil yang diperoleh sebanyak 76 dari 100 komentar menyatakan posisinya baik secara implisit maupun eksplisit. Komentar pembaca atas nama Hilman tersebut menyatakan posisinya kepada Ahok secara eksplisit. Terlihat dari komentar berupa pujian yang disebutkan dengan eksplisit “Hebat Bung Ahok.”



**Hilman Dr. Puradiredja**  
Rabu, 4 Maret 2015 | 19:51 WIB

Hebat Bung Ahok, Pemimpin seperti Bung Ahok yg muda, jujur, pintar dan berani yang ditunggu bangsa dan negara. Koruptor di Indonesia sudah menjadi kebiasaan, juga melanggar aturan sudah selalu m, menjadi maklum. Tiba saat nya Pemimpin seperti ini muncul .

Tanggapi Komentar

Laporkan Komentar

Skor: 0

👍 0 🗨️ 0

Pembaca atas nama Semar Gareng tersebut menunjukkan bentuk dukungannya kepada Ahok secara implisit melalui “Ternyata Ahok cukup jeli.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penulis atas nama Semar Gareng sebenarnya menunjukkan bentuk dukungannya kepada Ahok, dukungannya secara implisit juga didukung dengan kalimat awal yang mengkritik DPRD.



**Semar Gareng**

Jumat, 27 Februari 2015 | 15:38 WIB

DPRD sdh mengesahkan anggaran di Paripurna, trus diam2 masukan perubahan dng anggaran siluman tanpa sepengetahuan Pemprov DKI trus ditandatangani bersama,..akal2-an, yg ini dianggap yg sah ! ada udang dibalik batu. Ternyata Ahok cukup jeli.

Tanggapi Komentar

Laporkan Komentar

Skor: 0

0 0

Semakin beragam sudut pandang memungkinkan terciptanya peluang untuk berdiskusi dan terjadinya kondisi deliberatif. Dengan demikian syarat keempat kondisi demokrasi deliberatif sudah terpenuhi, karena keberagaman sudut pandang komentar pada konflik antara Ahok dengan DPRD DKI memungkinkan terciptanya diskusi. Selain itu dengan memiliki keberagaman sudut pandang maka kondisi demokrasi deliberatif semakin berkualitas.

### 5. Analisis Isi untuk kategori Interaksi

Hasil menunjukkan bahwa 27 komentar dari 100 komentar menanggapi atau berinteraksi dengan pembaca lain, sedangkan sisanya tidak ada bentuk interaksi dengan pembaca lain. Terdapat berbagai macam bentuk interaksi yang terjadi, berikut bentuk interaksi yang mendukung pernyataan dari pembaca lain:



**Subitun Ningsih**

Kamis, 5 Maret 2015 | 14:32 WIB

Setuju dengan @Warni dan @Sengkuni, sangat sedikit orang baik yang punya nyali, berani menanggung resiko nyawa untuk kepentingan rakyat. Rakyat harus mendukung Ahok habis-habisan, karena hanya ini kesempatan Indonesia untuk bangkit.

Tanggapi Komentar

Laporkan Komentar

Skor: 0

0 0

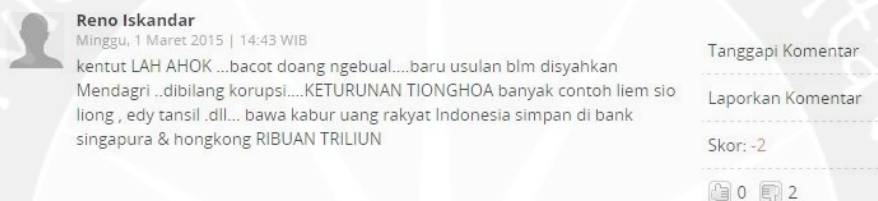
Pembaca Subitun Ningsih menyatakan setuju dengan apa yang dinyatakan sebelumnya oleh pembaca lain yakni Warni dan Sengkuni. Sabitun juga memberikan alasan dari komentar yang telah dibuat, dan mengajak pembaca pada umumnya untuk mendukung Ahok. Dengan demikian terjadi interaksi antara pembaca yang dijalin oleh Subitun, Warni dan Sengkuni. Interaksi tersebut merupakan bentuk respon yang mendukung komentar pembaca lain.

Dalam proses demokrasi deliberatif, kondisi deliberatif *conscientiousness* penting karena ada atau tidaknya proses interaksi merupakan kunci utama dari demokrasi deliberatif.. Dengan hasil komentar yang memicu terjadinya tanggapan

dari pembaca lain masih terbilang sedikit, sehingga interaksi untuk menuju kondisi deliberatif terhambat.

## 6. Analisis Isi untuk kategori Kesetaraan

Jika dilihat dari latar belakang Ahok sebenarnya kasus ini rentan menimbulkan diskriminasi. Beberapa komentar menyangkut dengan latar belakang Ahok yang bukan warga asli DKI, beragama non Islam, dan Tionghoa. Berikut komentar Reno dalam berita “Gue Ahok, Lawan Aksi Begal APBD” yang menyinggung keberagaman. Dari hasil penelitian diperoleh sebanyak 11 komentar tidak menghargai kesetaraan, artinya mengganggu keberagaman di Indonesia. Berikut salah satu contoh komentar negatif:



**Reno Iskandar**  
Minggu, 1 Maret 2015 | 14:43 WIB

kentut LAH AHOK ...bacot doang ngebaul...baru usulan blm disyahkan Mendagri ..dibilang korupsi...KETURUNAN TIONGHOA banyak contoh liem sio liong , edy tansil .dll... bawa kabur uang rakyat Indonesia simpan di bank singapura & hongkong RIBUAN TRILIUN

Tanggapi Komentar  
Laporkan Komentar  
Skor: -2  
0 2

Reno menuliskan komentar “Kentut lah Ahok, bacot doang ngebaul”, pernyataan dari komentar Reno tersebut tidak pantas untuk dituliskan . Reno juga menuliskan dalam kalimat selanjutnya “Keturunan Tionghoa...” dua pernyataan Reno dalam komentar yang diberikan dapat mengganggu keberagaman. Reno menjelek-jelekan Ahok dengan menyebutkan keturunan Tionghoa. Isi dari komentar tersebut tidak menghargai objek berita, dan mengaggu keberagaman yang ada.

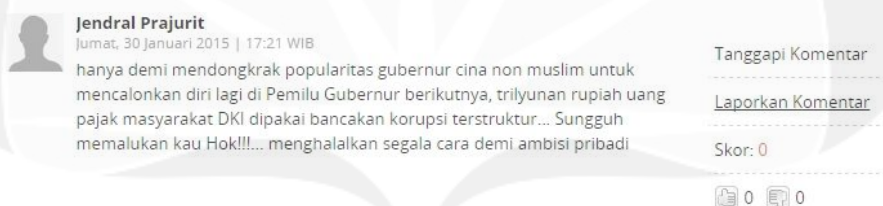
Kondisi demokrasi deliberatif dapat terwujud, jika kita menghargai satu dengan yang lain baik dalam isu yang kita bahas maupun orang lain. Sikap saling menghargai merupakan wujud dari proses demokrasi deliberatif, karena dengan saling menghargai diskusi berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat.

## 7. Analisis Isi untuk kategori Nama Pembaca

Dari 100 komentar yang diteliti terdapat 80 nama pembaca yang wajar digunakan sebagai nama orang. Indikator nama yang lazim dan tidak lazim yaitu pada bagaimana kita sering mendengar nama tersebut sebagai nama orang atau tidak. Meskipun pembaca memiliki nama yang lazim digunakan tetapi tidak seluruhnya melengkapi identitas yang ditetapkan oleh Kompas.com.

Selaras dengan pemikiran Fishkin seharusnya ketika orang melakukan demokrasi deliberatif harus menunjukkan identitas dirinya. Hal tersebut membuktikan bahwa anonimitas masih terjadi di media *online* dalam proses demokrasi deliberatif di Indonesia. Pembaca cenderung menggunakan haknya untuk berpendapat tanpa mementingkan identitas mendalam mengenai dirinya di publik. Pembaca menginginkan menjadi anonim dengan menggunakan nama-nama seperti “Kupat Tahu, Mbah Gugel, Cumi Asin, dll”

Jika dikaitkan dengan tiga tujuan yang telah diungkapkan Wallace, anonimitas dalam komentar pembaca Kompas.com terkait konflik antara Ahok dengan DPRD DKI sangat relevan dengan *point* satu dan dua. Sesuai *point* pertama pembaca Kompas.com memilih menjadi anonimitas untuk memperlancar pesan yang hendak disampaikan. Baik memperlancar pesan dalam bentuk positif ataupun negatif. Berikut salah satu pembaca anonimitas Kompas.com yang memilih menggunakan nama Jendral Prajurit untuk memberikan pesan negatif:



**Jendral Prajurit**  
 Jumat, 30 Januari 2015 | 17:21 WIB

hanya demi mendongkrak popularitas gubernur cina non muslim untuk mencalonkan diri lagi di Pemilu Gubernur berikutnya, trilyunan rupiah uang pajak masyarakat DKI dipakai bancakan korupsi terstruktur... Sungguh memalukan kau Hok!!!!... menghalalkan segala cara demi ambisi pribadi

Tanggapi Komentar  
 Laporkan Komentar

Skor: 0

0 0

Jendral Prajurit menggunakan kalimat negatif yaitu “cina non muslim” “sungguh memalukan kau Hok!”, melalui kalimat tersebut Jendral Prajurit mencoba memengaruhi pembaca lain untuk tidak menyukai Ahok. Selain untuk memperlancar pesan negatif, berikut salah satu contoh pembaca Kompas.com yang menyatakan diri anonimitas dan menyampaikan pesan positif:



**Korupsi is HALAL**  
 Selasa, 3 Maret 2015 | 09:25 WIB

@rocky setuju bro... Gak ada tuh kompromi sama koruptor2.... PDIP (hasto) itu akar permasalahan... Sebaiknya Jokowi tiru Ahok keluar dari PDIP dan buat partai baru (independent) sama Ahok dan relawan Jokowi.

Tanggapi Komentar  
 Laporkan Komentar

Skor: 0

0 0

Pembaca Korupsi is HALAL menunjukan pesan positif dengan memberikan tanggapan pada pembaca sebelumnya, dengan menggunakan *mention* “@rocky”. Isi yang disampaikan berisi pesan positif agar masyarakat tidak kompromi dengan koruptor.

Tidak hanya untuk memperlancar pesan yang hendak disampaikan, selaras dengan tujuan kedua Wallace pembaca menginginkan menjadi anonim karena untuk melindungi dirinya dari tindakan yang tidak diinginkan. Jika pembaca memiliki pesan yang tidak sesuai dengan pemikiran orang lain, anonimitas dijadikan dasar agar orang tersebut tidak mendapatkan tindak kejahatan. Dengan demikian wujud demokrasi deliberatif hanya sampai pada tataran penggunaan *nickname* oleh pembaca atau berupa anonimitas. Demokrasi deliberatif tidak dapat terlaksana jika seseorang menyatakan pendapat dengan anonimitas.

## **F.2 Analisis Berdasarkan Pendekatan Syarat Demokrasi Deliberatif – *Political Equality* atau Kesetaraan Politik dan *Participation***

Kompas.com berupaya membuat berita dengan menggunakan berbagai narasumber. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang seimbang. Berbagai narasumber yang digunakan Kompas.com dalam berita konflik Ahok dan DPRD DKI seperti pihak eksekutif, legislatif, pengamat politik dan anggota partai politik berkaitan dengan konflik.

Upaya media menunjukkan beragam narasumber dari pemerintahan agar masyarakat mendapatkan informasi politik yang seimbang dan masyarakat dapat dengan bebas berpartisipasi untuk menanggapi informasi tersebut. Dengan demikian demokrasi deliberatif dapat terpenuhi jika informasi yang diberikan seimbang dan tidak membatasi pembaca untuk memberikan komentarnya pada pihak manapun.

## **G. KESIMPULAN**

Peneliti menyimpulkan, komentar pembaca pada konflik antara Ahok dengan DPRD DKI di Kompas.com belum sepenuhnya merupakan bentuk interaksi demokrasi deliberatif. Hal tersebut terbukti dari skor yang diperoleh pada syarat interaksi yaitu 27. Dengan hasil skor interaksi yang tidak mencapai setengah sampel atau 50 komentar, maka proses demokrasi deliberatif terhambat karena peluang untuk adanya diskusi antar pembaca komentar tidak banyak. Padahal kunci utama proses demokrasi deliberatif adalah interaksi atau diskusi.

Meskipun dalam kolom komentar di media *online* memiliki *space* banyak, proses demokrasi tidak serta merta bebas dilakukan. Sikap saling menghargai antara pembaca dan keterbukaan diri harus diperlihatkan. Hasil penelitian menunjukkan nama yang tidak lazim digunakan di media *online* sebanyak 20%. Beberapa pembaca Kompas.com masih menyatakan diri sebagai anonim. Anonimitas digunakan untuk melancarkan pesan yang hendak disampaikan dan untuk melindungi diri dari tindakan orang lain. Tetapi, menjadi anonim tidak selaras dengan proses demokrasi deliberatif .

#### H. SARAN

Peneliti menyarankan perlu dilakukan riset lanjutan dalam menggali informasi mengenai *profile* pembaca, dengan memaparkan aktivitas pembaca dalam membuat komentar. Selain itu saran selanjutnya media online seharusnya memberlakukan aturan yang lebih ketat bagi pembaca yang tidak melakukan *update* berkala pada *profile* pembaca. Penelitian selanjutnya juga bisa menggali lebih dalam mengenai media *online* yang justru membuka peluang anonimitas dari segi lemahnya peraturan yang diterapkan media itu sendiri. Selain itu, peneliti juga dapat melihat seberapa banyak media melakukan *blow up* opini dari masyarakat.

#### I. DAFTAR PUSTAKA

Fishkin, S,James. 2009. *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public*. New York: Oxford University Press.

Hardiman, F. Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Alexa. Juni 2015. *How popouler is Kompas.com?*. Alexa.com. (diakses pada tanggal 2 Juli 2015 pukul 14:37) dari (<http://www.alex.com/topsites/countries/ID>)

Wallace, Kathllen. 2008. *The Handbook of Information and Computer Ethics*. New Jersey (diakses 17 Februari 2016) dari (<http://jgustilo.pbworks.com/f/the-handbook-of-information-and-computer-ethics.pdf>)